

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami tantangan yang cukup beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,03 % (y-on-y). Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia masih bergerak positif meskipun tetap menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain inflasi yang berfluktuasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia, serta dampak pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di tahun 2020. Kondisi ini tentu berpengaruh pada sektor perbankan, karena bank berperan penting dalam menyalurkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan likuiditas kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan, baik individu, pelaku usaha, maupun pemerintah.

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada berbagai sektor ekonomi, termasuk individu, dan usaha kecil menengah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Ginting, 2017). Dengan kata lain, bank berperan sebagai penghubung yang memastikan dana yang tersedia di masyarakat dapat digunakan secara produktif untuk kegiatan ekonomi. Oleh karena itu kesehatan perbankan menjadi faktor yang sangat penting, karena semakin sehat kondisi perbankan maka semakin besar pula kapasitas perbankan dalam menyalurkan sektor riil. Jika kondisi perbankan terganggu, maka fungsi intermediasi



ini tidak berjalan optimal dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan erat ini menunjukkan bahwa sektor perbankan selalu terkait dengan perubahan dalam ekonomi makro yang lebih luas.

Perubahan kondisi makroekonomi sering kali tercermin langsung dalam kinerja sektor perbankan. Misalnya, Kenaikan suku bunga membuat masyarakat dan pelaku usaha lebih berhati-hati untuk mengajukan pinjaman karena biaya cicilan ikut meningkat, sehingga potensi terjadinya kredit bermasalah juga bertambah (Dewi & Purbawangsa, 2018). Inflasi yang tinggi dapat menekan daya beli masyarakat, menyebabkan kemampuan debitur dalam membayar pinjaman melemah dan risiko NPL naik (Putri & Nasution, 2020). Fluktuasi nilai tukar rupiah juga menjadi tantangan, terutama bagi debitur yang mengambil pinjaman dalam valuta asing, karena pelemahan rupiah akan menambah beban cicilan mereka (Falianty, 2017). Sebaliknya, pertumbuhan PDB yang positif mencerminkan ekonomi yang lebih kuat, pendapatan masyarakat meningkat, dan kemampuan membayar kredit semakin baik, sehingga dapat menurunkan tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) dan mendorong bank lebih berani untuk menyalurkan kredit (Handayani & Pramono, 2019). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa stabilitas makroekonomi sangat menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit.

Kredit sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian. Bagi perbankan, kredit merupakan sumber utama pendapatan yang menentukan kinerja keuangan mereka. Jika penyaluran kredit berjalan lancar dengan kualitas k, maka perbankan menjalankan fungsi intermediasi dengan optimal. Jika pertumbuhan kredit melemah atau kualitas kredit menurun, maka hal



ini bisa menjadi penyebab adanya masalah dalam sistem keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, meneliti perkembangan dan penyaluran kredit menjadi sangat penting untuk memahami kondisi sektor keuangan Indonesia, terutama melalui analisis mendalam terhadap indikator utama perbankan yaitu rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan atau NPL*) yang menjadi tolak ukur kualitas kredit.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kredit dan *Non-Performing Loan (NPL)* di Indonesia dapat dilihat dari data empiris pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan *Non-Performing Loans (NPL)* Bank Umum di Indonesia (2014–2024)

Tahun	NPL (%)
2014	1,97%
2015	2,31%
2016	2,77%
2017	2,44%
2018	2,20%
2019	2,33%
2020	2,64%
2021	2,64%
2022	2,14%
2023	1,95%
2024	2,08%

World Bank, *Non-Performing Loans to Total Gross Loans for Indonesia*, 2024.



Tabel 1.2 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (2014–2024)

Tahun	Penyaluran Kredit (Miliar Rp)
2014	2.874.807
2015	3.180.717
2016	3.519.395
2017	3.815.718
2018	4.199.542
2019	4.711.545
2020	4.711.545
2021	4.769.653
2022	5.178.812
2023	5.693.094
2024	6.305.056

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia (SEKI) – Posisi Kredit Bank Umum Tahun 2014–2024 (diolah penulis).

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penyaluran kredit perbankan di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun disertai fluktuasi pada rasio NPL. Pada tahun 2014, total penyaluran kredit tercatat sebesar Rp2.874.807 miliar rupiah dengan NPL sebesar 1,97%. Kredit kemudian terus tumbuh hingga mencapai Rp3.519.395 miliar rupiah pada tahun 2016 dengan NPL yang meningkat menjadi 2,77%, yang merupakan titik tertinggi selama periode pengamatan. Setelah itu, kinerja kredit tetap meningkat seiring

membaiknya kualitas kredit, tercermin dari penurunan NPL menjadi ada 2018. Namun, pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19



menyebabkan laju pertumbuhan kredit melambat dengan NPL meningkat ke level 2,64%. Setelah pandemi mereda, penyaluran kredit kembali tumbuh signifikan hingga mencapai Rp5.693.094 miliar rupiah pada tahun 2023 dengan NPL turun ke 1,95%, yang menjadi angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, pada tahun 2024 NPL kembali naik sedikit menjadi 2,08% di tengah peningkatan kredit yang mencapai Rp6.305.056 miliar rupiah. Data tersebut menyimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan penyaluran kredit, masalah risiko kualitas kredit NPL tetap menjadi hambatan signifikan yang harus dihadapi oleh perbankan.

NPL yang tinggi menandakan adanya kredit bermasalah dalam jumlah signifikan. Hal ini mengurangi profitabilitas bank karena dana harus dialokasikan untuk cadangan kerugian kredit. NPL yang tinggi dapat mengganggu kemampuan bank untuk menyalurkan kredit pada siklus berikutnya, karena bank akan menerapkan kebijakan yang lebih ketat. Sebaliknya, jika NPL dapat ditekan pada level yang rendah, maka bank akan lebih leluasa menyalurkan kredit baru yang dibutuhkan oleh sektor riil. Dengan demikian, NPL tidak hanya menjadi indikator kualitas kredit, tetapi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi siklus penyaluran kredit berikutnya. Pemilihan NPL sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini didasarkan pada perannya yang strategis sebagai indikator kesehatan perbankan yang secara langsung memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Dengan demikian, NPL tidak hanya mencerminkan risiko kredit, tetapi juga menjadi penghubung utama antara faktor makroekonomi

itas intermediasi perbankan.



Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori risiko kredit. Teori ini berpendapat bahwa tingginya risiko gagal bayar yang ditanggung bank akan mendorong bank untuk bersikap lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman baru. Dengan kata lain, risiko kredit tidak hanya memengaruhi kondisi keuangan bank saat ini, tetapi juga menentukan perilaku perbankan di masa depan. Teori risiko kredit sangat relevan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan bagaimana NPL berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan kondisi makroekonomi dengan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit.

Hasil penelitian sebelumnya juga mendukung pandangan ini. Al-Homaidi et al. (2020) menemukan bahwa inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kualitas kredit perbankan. Penelitian oleh Akter dan Roy (2017) menunjukkan adanya hubungan negatif antara suku bunga dengan penyaluran kredit. Namun demikian beberapa penelitian terdahulu fokus utamanya masih pada pengaruh langsung faktor makroekonomi terhadap NPL atau penyaluran kredit secara terpisah. Akan tetapi, hanya sedikit penelitian yang membahas peran NPL sebagai penghubung atau variabel mediasi antara faktor makroekonomi dan penyaluran kredit. Padahal, posisi NPL sangat penting untuk melihat bagaimana perubahan ekonomi makro bisa memengaruhi penyaluran kredit secara tidak langsung. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran NPL sebagai variabel mediasi, yang belum banyak dikaji dalam konteks perbankan Indonesia.

Penelitian ini juga menjadi penting secara praktis karena hasilnya dapat memberikan gambaran bagi perbankan, regulator, dan pemerintah mengenai bagaimana pengelolaan NPL dapat memperkuat fungsi intermediasi dan



menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting karena berbeda dengan studi sebelumnya dengan menempatkan NPL sebagai variabel mediasi, sehingga penelitian ini dapat mengungkap kesesuaian antara masalah yang ada pada sisi permintaan kredit dan penawaran kredit, sehingga kredit yang berputar nantinya lebih optimal. Penelitian ini juga menggunakan periode yang panjang yaitu 2005–2024 untuk mencapture dinamika penting seperti krisis global 2008, perlambatan ekonomi 2015, dan pandemi COVID-19 pada 2020. Dengan cakupan waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana variabel makroekonomi berpengaruh terhadap penyaluran kredit melalui variabel NPL secara tidak langsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap penyaluran kredit secara tidak langsung melalui *Non-Performing Loan (NPL)*?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit secara tidak langsung melalui *Non-Performing Loan (NPL)*?
3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap penyaluran kredit secara tidak langsung melalui *Non-Performing Loan (NPL)*?
4. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap penyaluran kredit secara tidak langsung melalui *Non-Performing Loan (NPL)*?
5. Apakah rasio *Non-Performing Loan (NPL)* berpengaruh terhadap penyaluran kredit di Indonesia?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap penyaluran kredit secara tidak langsung melalui *Non-Performing Loan (NPL)*.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penyaluran kredit secara tidak langsung melalui *Non-Performing Loan (NPL)*.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap penyaluran kredit secara tidak langsung melalui *Non-Performing Loan (NPL)*.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDB terhadap penyaluran kredit secara tidak langsung melalui *Non-Performing Loan (NPL)*.
5. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Non-Performing Loan (NPL)* terhadap penyaluran kredit di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yang besar mengenai pengaruh faktor makroekonomi terhadap NPL dan penyaluran kredit. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat dasar teori mengenai hubungan variabel makroekonomi dengan risiko kredit, sehingga menjadi rujukan penting bagi

berikutnya di bidang ekonomi dan perbankan.



2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi perbankan dalam mengelola risiko kredit serta membantu pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas perbankan. Yang terpenting penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memberi gambaran jelas bagaimana perubahan suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi bisa memengaruhi kemampuan mereka membayar pinjaman. Dengan begitu, pelaku usaha bisa lebih siap menghadapi perubahan ekonomi dan mengatur strategi usahanya agar tidak terjebak dalam kredit bermasalah



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeterian pertama kali dikenalkan oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1934. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi terutama digerakkan oleh inovasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan produktivitas yang membuat output nasional naik dan kesejahteraan masyarakat membaik. Kalau ekonomi tumbuh pesat, kondisi keuangan masyarakat dan perusahaan juga lebih sehat sehingga kemampuan mereka membayar pinjaman ke bank meningkat. Akibatnya, jumlah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan (NPL)* biasanya menurun seiring dengan naiknya Produk Domestik Bruto (PDB) (Schumpeter, 1934). Sebaliknya, kalau pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan masyarakat berkurang, arus kas perusahaan terganggu, dan risiko gagal bayar semakin besar. Kondisi seperti ini bisa memperburuk kualitas kredit di perbankan (Salas et al., 2024). Walaupun begitu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan NPL tidak selalu otomatis. Pertumbuhan yang terlalu cepat kadang mendorong bank menyalurkan kredit secara berlebihan tanpa memperhatikan risiko, yang justru bisa meningkatkan NPL.



Selain itu, kalau pertumbuhan ekonomi tidak merata, sebagian masyarakat tetap sulit membayar pinjaman meskipun PDB meningkat. Faktor lain seperti inflasi, kenaikan suku bunga, dan perubahan nilai tukar juga bisa memengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas kredit,

terutama dalam jangka pendek (Chang et al., 2025). Beberapa penelitian juga menunjukkan hal serupa. Messai dan Jouini (2013) menemukan bahwa pertumbuhan GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL di Eropa, artinya makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin rendah rasio kredit bermasalah. Hasil yang sama juga ditemukan Makri et al. (2014) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara konsisten membantu menurunkan NPL di berbagai negara dalam jangka panjang.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi Schumpeterian memberi dasar penting untuk memahami bagaimana PDB berhubungan dengan kesehatan perbankan. Pertumbuhan ekonomi yang positif bukan hanya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, tapi juga memperkuat kemampuan bayar kredit. Karena itu, teori ini relevan dipakai untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap NPL sekaligus kaitannya dengan penyaluran kredit di perbankan, khususnya di Indonesia yang sedang berkembang.

2.1.2 Credit Channel Theory

Teori *Credit Channel Theory* menjelaskan bahwa kondisi kesehatan bank sangat berpengaruh pada kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. Kalau bank punya aset yang sehat, misalnya NPL rendah dan modal kuat, mereka akan lebih berani menyalurkan pinjaman dalam jumlah besar. Tapi kalau NPL tinggi, bank jadi lebih berhati-hati, bahkan bisa memperketat syarat pinjaman atau ekspansi kredit supaya tidak menanggung risiko kerugian lebih besar (nas et al., 2023). Dalam konteks ini, NPL dipahami sebagai indikator kredit perbankan yang mencerminkan risiko gagal bayar atas



keseluruhan portofolio kredit, baik yang berasal dari aktivitas pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri.

Teori ini awalnya muncul dari kajian transmisi kebijakan moneter pada tahun 1990-an yang dipopulerkan oleh Bernanke dan Gertler (1995), di mana dijelaskan bahwa perubahan suku bunga dan kondisi keuangan bank sangat memengaruhi penawaran kredit. Saat NPL naik, risiko gagal bayar juga ikut meningkat sehingga bank lebih memilih mengurangi penyaluran kredit baru demi menjaga kualitas asetnya. Kondisi NPL yang tinggi juga membuat bank harus menyisihkan lebih banyak cadangan kerugian dan menanggung biaya tambahan untuk mengurus kredit macet. Kondisi ini berlaku baik untuk kredit domestik maupun kredit yang memiliki eksposur lintas negara, sehingga peningkatan NPL dari salah satu sumber tersebut tetap berdampak pada kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara keseluruhan.

Hal ini tentu mengurangi modal yang bisa dipakai, sehingga ruang bank untuk memberikan kredit baru semakin sempit. Akibatnya, bank jadi lebih selektif dalam memilih debitur, dengan memperketat syarat pinjaman dan lebih memperhatikan faktor seperti modal serta likuiditas (Bernanke & Gertler, 1995; Fakhrunnas et al., 2023). Walaupun begitu, teori ini tidak selalu berlaku sama di semua negara. Di negara dengan regulasi ketat, dampak NPL bisa lebih cepat dikendalikan, sementara di negara yang perbankannya lemah atau saat krisis, bank justru cenderung menahan kredit dalam waktu lama. Selain itu, faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi juga bisa

aruhi seberapa kuat pengaruh credit channel terhadap penyaluran kredit
) . Sejumlah penelitian mendukung hal ini.



Misalnya, Pamungkas et al. (2025) menemukan bahwa penurunan suku bunga mampu mendorong peningkatan kredit, terutama untuk usaha kecil dan pinjaman konsumsi, sementara Li (2017) menunjukkan bahwa bank dengan modal lebih kuat biasanya bisa menyalurkan kredit lebih banyak ketika kondisi ekonomi mendukung. Dengan demikian, Credit Channel Theory menegaskan bahwa kesehatan bank yang tercermin dari tingkat NPL baik yang bersumber dari kredit dalam negeri maupun kredit luar negeri memegang peranan penting dalam menjembatani pengaruh kondisi makroekonomi terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.

2.1.3 Teori Risiko Kredit

Teori Risiko Kredit pertama kali dikenalkan oleh Merton pada tahun 1974 lewat model yang menjelaskan bahwa risiko kredit muncul ketika seseorang tidak bisa membayar kembali pinjamannya. Hal ini biasanya terjadi saat nilai aset atau harta debitur tidak cukup untuk menutup utang yang dimiliki. Pemikiran Merton ini kemudian menjadi dasar dalam perkembangan teori manajemen risiko kredit modern yang banyak dipakai bank di seluruh dunia. Seiring waktu, teori ini juga berkembang dengan melihat pengaruh dari kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, maupun pertumbuhan ekonomi (Nkusu, 2011). Misalnya, suku bunga yang naik akan membuat cicilan pinjaman menjadi lebih besar sehingga meningkatkan risiko gagal bayar. Inflasi yang tinggi bisa menekan daya beli masyarakat, sehingga banyak orang kesulitan melunasi pinjaman. Perubahan nilai tukar juga berisiko bagi debitur yang berutang dalam
ang asing. Sebaliknya, saat pertumbuhan ekonomi meningkat,
ian masyarakat ikut naik sehingga kemampuan membayar utang pun



menjadi lebih baik (Salas et al., 2024; Chun & Ardaaragchaa 2024; Xie, Ye, & Guo, 2023).

Namun, teori ini juga tidak lepas dari kritik. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pengaruh kondisi makroekonomi terhadap kredit bermasalah (NPL) tidak sepenuhnya besar, karena masih dipengaruhi juga oleh faktor internal bank, seperti modal, manajemen risiko, dan tata kelola. Ada juga yang menilai teori ini terlalu fokus pada risiko gagal bayar, padahal faktor dari bank sendiri juga bisa memperburuk kualitas kredit, terutama di negara berkembang yang sistem perbankannya masih lemah (Baskaya et al., 2023; Chang et al., 2025).

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa risiko kredit memang punya hubungan erat dengan penyaluran kredit. Chun & Ardaaragchaa (2024) menemukan bahwa tingginya NPL di Mongolia membuat pertumbuhan kredit bank menurun. Xie, Ye, & Guo (2023) juga menemukan hal serupa di Tiongkok, di mana kenaikan NPL membuat bank enggan memberi pinjaman baru. Thornton & Di Tommaso (2021) menambahkan bahwa dampak NPL terhadap penyaluran kredit bisa berbeda tergantung pada kekuatan modal dan profitabilitas bank. Temuan lain dari Chang et al. (2025) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kenaikan NPL berhubungan dengan penurunan aset bank, sedangkan Baskaya et al. (2023) di Eropa menegaskan bahwa kebijakan pengakuan NPL bisa membantu memperbaiki aliran kredit meski hasilnya berbeda-beda antar bank.

Berdasarkan uraian tersebut, teori risiko kredit memberi gambaran bahwa inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi bisa mempengaruhi munculnya kredit bermasalah (NPL), yang kemudian berdampak pada penyaluran kredit perbankan. Semakin tinggi NPL, semakin hati-hati bank



dalam menyalurkan pinjaman baru. Namun, dampaknya tidak selalu sama karena juga tergantung kondisi internal setiap bank. Dengan begitu, teori ini tetap relevan untuk menjelaskan hubungan antara faktor makroekonomi, kualitas kredit, dan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit di Indonesia.

2.1.4 Teori *Fisher Effect*

Teori *Fisher Effect* dikenalkan oleh Irving Fisher pada tahun 1930. Teori ini menjelaskan bahwa bunga nominal pada dasarnya terbentuk dari bunga riil ditambah dengan perkiraan inflasi. Artinya, kalau inflasi naik, bunga nominal juga akan ikut naik supaya nilai riil dari pinjaman maupun investasi tetap terjaga. Pemikiran ini menjadi salah satu dasar penting dalam ekonomi moneter karena bisa menjelaskan hubungan antara inflasi, suku bunga, dan kestabilan sektor keuangan. Seiring perkembangan, hubungan ini juga dipakai untuk melihat dampaknya terhadap kondisi ekonomi yang lebih luas, misalnya pada pertumbuhan PDB, kualitas kredit yang tercermin dalam rasio kredit bermasalah atau NPL, serta kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Inflasi yang tinggi biasanya menurunkan daya beli masyarakat dan menambah beban biaya perusahaan, sehingga mereka kesulitan membayar pinjaman. Hal ini mendorong naiknya NPL dan akhirnya membuat bank lebih berhati-hati menyalurkan kredit baru. Dengan kata lain, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi punya peran yang saling terhubung dalam memengaruhi risiko kredit dan penyaluran kredit di sektor perbankan (Milenković et al., 2024; Goodhart, 2023).



eski begitu, hubungan antara inflasi dan suku bunga yang dijelaskan
lak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, pengaruh inflasi terhadap

bunga nominal bisa berbeda antarnegara atau antarperiode waktu. Misalnya, dalam jangka pendek, faktor seperti kebijakan moneter bank sentral, pergerakan nilai tukar, atau ekspektasi pelaku pasar bisa membuat bunga nominal tidak naik sebanding dengan inflasi. Kim, Lin, Hsieh, dan Suen (2018) bahkan menemukan bahwa Efek Fisher sering kali tidak berlaku penuh satu banding satu, karena hanya sebagian kenaikan inflasi yang tercermin pada bunga nominal. Selain itu, di negara berkembang pertumbuhan PDB yang tinggi tidak selalu berarti NPL menurun, karena masalah tata kelola perbankan dan lemahnya pengawasan membuat kredit bermasalah tetap tinggi (Baskaya et al., 2023).

Penelitian empiris juga menunjukkan hasil yang beragam. Milenković et al. (2024) menemukan bahwa inflasi yang tidak terkendali mendorong kenaikan NPL di perbankan Eropa. Goodhart (2023) menekankan bahwa inflasi yang berlangsung lama bisa meningkatkan risiko gagal bayar, apalagi jika penyaluran kredit tidak diimbangi pengendalian moneter. Kim et al. (2018) menunjukkan bahwa meskipun inflasi mendorong naiknya bunga nominal, kekuatan hubungan ini sangat tergantung kondisi ekonomi tiap negara. Ruzima (2022) di Rwanda juga menemukan adanya *Fisher Effect* dalam jangka panjang, walau tidak konsisten di jangka pendek. Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa nilai tukar yang bergejolak dan perlambatan PDB dapat menambah tekanan pada NPL dan membatasi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit (Thornton & Di Tommaso, 2021; Xie, Ye, & Guo, 2023).

Dari uraian tersebut, Teori *Fisher Effect* memberi gambaran bahwa inflasi
ya berpengaruh pada bunga nominal, tapi juga punya dampak penting
kualitas kredit perbankan melalui peningkatan NPL, yang pada akhirnya



memengaruhi penyaluran kredit. Walaupun begitu, kekuatan hubungan ini sangat bergantung pada kestabilan ekonomi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, dan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan moneter. Karena itu, teori ini tetap relevan untuk digunakan dalam memahami keterkaitan inflasi, suku bunga, nilai tukar, PDB, NPL, dan penyaluran kredit, terutama dalam konteks perbankan di negara berkembang seperti Indonesia.

2.1.5 Teori Paritas Daya Beli

Teori Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Cassel pada tahun 1918. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa barang yang sama seharusnya memiliki harga yang sama di negara yang berbeda jika sudah dikonversi dengan nilai tukar yang sesuai. Dari pemikiran tersebut, PPP menjelaskan bahwa dalam jangka panjang nilai tukar akan menyesuaikan agar daya beli antar mata uang tetap seimbang. Artinya, kalau inflasi di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka mata uang domestik cenderung melemah atau terdepresiasi supaya daya belinya tidak terlalu jauh berbeda.

Dalam dunia perbankan, teori ini penting karena nilai tukar bisa berpengaruh besar pada kemampuan bayar debitur. Misalnya, kalau rupiah melemah, maka beban cicilan kredit dalam mata uang asing akan meningkat. Debitur harus menukar lebih banyak rupiah untuk membayar jumlah yang sama, sehingga risiko gagal bayar juga bisa meningkat dan tercermin dalam naiknya rasio *Non-Performing Loan (NPL)*. Penelitian Allen dan Dreon (2022) di

menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah bersama dengan inflasi berdampak signifikan terhadap naiknya NPL di sektor perbankan.



Namun, dampak nilai tukar tidak selalu sama bagi semua debitur. Pelemahan rupiah bisa menjadi masalah bagi perusahaan yang bergantung pada impor, tetapi justru bisa menguntungkan bagi eksportir karena mereka menerima pendapatan dalam valuta asing yang nilainya naik. Dengan tambahan pendapatan tersebut, kemampuan bayar mereka malah bisa lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kurs terhadap NPL sangat bergantung pada jenis usaha dan struktur pendapatan debitur.

Walaupun sering digunakan untuk menjelaskan hubungan jangka panjang, teori PPP juga mendapat kritik. Dalam praktiknya, nilai tukar dalam jangka pendek sering dipengaruhi faktor lain seperti spekulasi, arus modal, atau kebijakan moneter, sehingga tidak selalu sesuai dengan prediksi PPP. Kuutol (2016) menemukan bahwa depresiasi mata uang di Afrika meningkatkan NPL, tetapi besar kecilnya dampak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kelembagaan di negara tersebut. Begitu juga penelitian Aydemir et al. (2022) di Turki yang menunjukkan bahwa gejolak kurs bisa memperburuk kualitas kredit bank, meskipun efeknya tidak selalu permanen.

Secara umum, banyak bukti empiris yang mendukung relevansi PPP dalam menjelaskan hubungan nilai tukar dengan risiko kredit. Allen dan Drean (2022) di Indonesia menunjukkan bahwa depresiasi rupiah bisa memperparah NPL, terutama pada bank yang punya banyak pinjaman berbasis valuta asing. Kuutol (2016) juga membuktikan hal serupa di Afrika, sementara Aydemir et al. (2022) menegaskan dampak volatilitas kurs di Turki terhadap kualitas aset bank.



Berdasarkan uraian ini, teori PPP tetap penting sebagai landasan untuk memahami bagaimana inflasi, nilai tukar, dan daya beli mata uang berkaitan

dengan stabilitas perbankan. Dalam konteks Indonesia, pelemahan rupiah bisa menjadi ancaman bagi debitur yang banyak impor, tapi sekaligus peluang bagi eksportir. Oleh karena itu, dampaknya terhadap NPL tidak selalu searah, melainkan tergantung pada struktur ekonomi dan karakteristik usaha debitur.

2.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.2.1 Hubungan Suku Bunga terhadap NPL dan Penyaluran Kredit

Suku bunga adalah alat penting dalam kebijakan moneter yang langsung memengaruhi aktivitas ekonomi lewat perubahan biaya pinjaman. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman ikut meningkat sehingga kemampuan bayar debitur menurun dan risiko kredit macet (NPL) bertambah. Kenaikan suku bunga juga menurunkan permintaan kredit karena pinjaman menjadi lebih mahal. Tsolmon dan Tissot (2022) menemukan bahwa kenaikan suku bunga berhubungan signifikan dengan naiknya NPL di banyak negara, terutama di negara berkembang. Akter dan Roy (2017) juga mengonfirmasi bahwa suku bunga tinggi mengurangi penyaluran kredit karena risiko pembiayaan makin besar. Bernanke dan Gertler (1995), lewat "*credit channel theory*", menjelaskan bahwa suku bunga tinggi memperburuk kondisi keuangan debitur, sehingga memengaruhi jumlah dan distribusi kredit oleh bank. Ghosh (2015) menambahkan bahwa kebijakan suku bunga di Asia Tenggara efektif dalam memengaruhi NPL, terutama di sektor korporasi. Jadi, suku bunga memengaruhi penyaluran kredit secara langsung dan juga melalui pengaruhnya pada NPL.



2.2.2 Hubungan Inflasi terhadap NPL dan Penyaluran Kredit

Inflasi dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah karena menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan biaya operasional perusahaan. Kondisi ini melemahkan arus kas debitur dan meningkatkan kemungkinan gagal bayar, sehingga rasio NPL cenderung naik. Beberapa penelitian juga mendukung adanya hubungan positif antara inflasi dan NPL. Studi dengan pendekatan *Vector Error Correction Model (VECM)* di Indonesia menemukan bahwa kenaikan inflasi secara signifikan meningkatkan rasio NPL, menandakan bahwa inflasi tinggi memperburuk kualitas kredit perbankan. Hasil serupa juga terlihat pada penelitian di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, yang menunjukkan semakin tinggi inflasi, semakin besar pula potensi terjadinya kredit bermasalah. Temuan-temuan ini memperkuat teori Fisher Effect yang dikemukakan oleh Irving Fisher (1930), bahwa inflasi tinggi akan mendorong kenaikan suku bunga nominal sehingga beban cicilan pinjaman semakin berat. Oleh karena itu, inflasi yang tidak terkendali dapat memperburuk kualitas kredit perbankan melalui peningkatan NPL.

2.2.3 Hubungan Nilai Tukar terhadap NPL dan Penyaluran Kredit

Nilai tukar sangat penting dalam perekonomian terbuka, terutama untuk negara yang bergantung pada impor dan punya utang luar negeri. Depresiasi nilai tukar membuat beban utang valuta asing bagi debitur semakin berat, sehingga risiko gagal bayar meningkat. Fluktuasi nilai tukar yang tajam,



pelemahan, juga menaikkan biaya produksi terutama dari bahan baku yang akhirnya menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Beck, Jakubik, dan Liu (2013) menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar berkaitan positif

dengan kenaikan rasio NPL. Al-Homaidi et al. (2020) menambahkan bahwa nilai tukar adalah variabel makro yang penting dalam menentukan kualitas kredit di perbankan India. Menurut *Credit Risk Theory* dari Merton (1974), depresiasi nilai tukar dapat menurunkan nilai aset debitur dan meningkatkan probabilitas gagal bayar, sehingga memperburuk kualitas kredit dan menahan aliran kredit dari sektor keuangan ke sektor riil.

2.2.4 Hubungan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap NPL dan Penyaluran Kredit

PDB menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan debitur membayar pinjaman. Saat ekonomi tumbuh, pendapatan naik sehingga risiko gagal bayar menurun, terlihat dari turunnya rasio NPL. Pertumbuhan PDB juga meningkatkan permintaan kredit untuk konsumsi dan investasi. Messai dan Jouini (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB secara signifikan menurunkan NPL dan mendorong penyaluran kredit. Penelitian Bofondi dan Ropele (2011) di Italia juga membuktikan bahwa kenaikan PDB membuat perbankan lebih yakin memperluas kredit. Menurut *Schumpeterian Growth Theory*, pertumbuhan ekonomi yang kuat mendorong peningkatan inovasi, produktivitas, serta pendapatan, sehingga kemampuan bayar debitur membaik dan bank memiliki ruang lebih besar untuk memperluas penyaluran kredit. Barajas et al. (2010) menambahkan bahwa PDB sebagai indikator makro berpengaruh besar terhadap dinamika NPL di negara berkembang, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat membantu mengurangi

risiko pada sistem keuangan.



2.2.5 Hubungan Rasio NPL terhadap Penyaluran Kredit

NPL (Non-Performing Loan) menjadi indikator utama kesehatan keuangan bank. Saat rasio NPL naik, bank harus menyiapkan dana cadangan lebih besar untuk menutup kerugian, sehingga kapasitas menyalurkan kredit baru menjadi terbatas. Selain itu, kenaikan NPL meningkatkan risiko di sektor perbankan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Makri, Tsagkanos, dan Bellas (2014) menyatakan bahwa akumulasi NPL menghambat fungsi intermediasi bank dan menurunkan efisiensi sistem keuangan. Klein (2013) melaporkan kepada IMF bahwa tingginya rasio NPL menyebabkan stagnasi kredit dan melemahkan peran sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi. Gurley dan Shaw (1960) juga menjelaskan bahwa fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi terganggu jika portofolio pinjaman didominasi oleh kredit bermasalah. Jadi, berbagai studi menunjukkan bahwa variabel makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan PDB berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada penyaluran kredit melalui peran NPL. Oleh karena itu, memahami hubungan ini penting untuk merancang kebijakan moneter, makroprudensial, dan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi ekonomi.

2.3 Studi Empiris

Penelitian empiris mengenai hubungan antara variabel makroekonomi (suku bunga, inflasi, nilai tukar dan PDB), *Non-Performing Loan* (NPL atau Kredit Macet) dan penyaluran kredit di Indonesia menunjukkan temuan yang relatif konsisten dalam menggambarkan dinamika risiko kredit perbankan. Secara umum, penelitian-penelitian yang ada pada umumnya memperlihatkan bahwa



faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat NPL yang pada akhirnya berdampak pada perilaku penyaluran kredit bank. NPL sering menjadi indikator utama untuk melihat seberapa baik kualitas kesehatan aset perbankan, sehingga perubahan kondisi makroekonomi dapat tercermin melalui kenaikan atau penurunan NPL. Berbagai penelitian mencoba menjelaskan hubungan ini, namun dengan fokus yang berbeda-beda.

Penelitian Simatupang (2021) menunjukkan bahwa suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL, sementara nilai tukar terbukti berpengaruh positif signifikan. Penelitian ini menggambarkan bahwa tekanan eksternal, terutama dari pergerakan nilai tukar, lebih sensitif dalam memengaruhi risiko kredit dibandingkan faktor ekonomi dalam negeri seperti inflasi. Penelitian Saputra dan Rahayu (2023) juga mendukung pola tersebut, di mana inflasi ditemukan tidak signifikan dalam jangka pendek, tetapi nilai tukar berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap NPL. Hal ini menegaskan bahwa fluktuasi nilai tukar memiliki dampak yang bersifat mendasar terhadap kualitas kredit perbankan, terutama ketika depresiasi rupiah meningkatkan beban pembayaran debitur.

Di sisi lain, pengaruh kondisi ekonomi riil terhadap risiko kredit juga banyak ditunjukkan dalam berbagai penelitian terdahulu. Penelitian Hariyanti (2024) menemukan bahwa PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL, yang berarti semakin kuat pertumbuhan ekonomi, semakin rendah risiko gagal bayar. Penelitian Ginting (2017) juga menunjukkan pola yang sama, yakni PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL, sementara suku bunga dan inflasi cenderung meningkatkan risiko



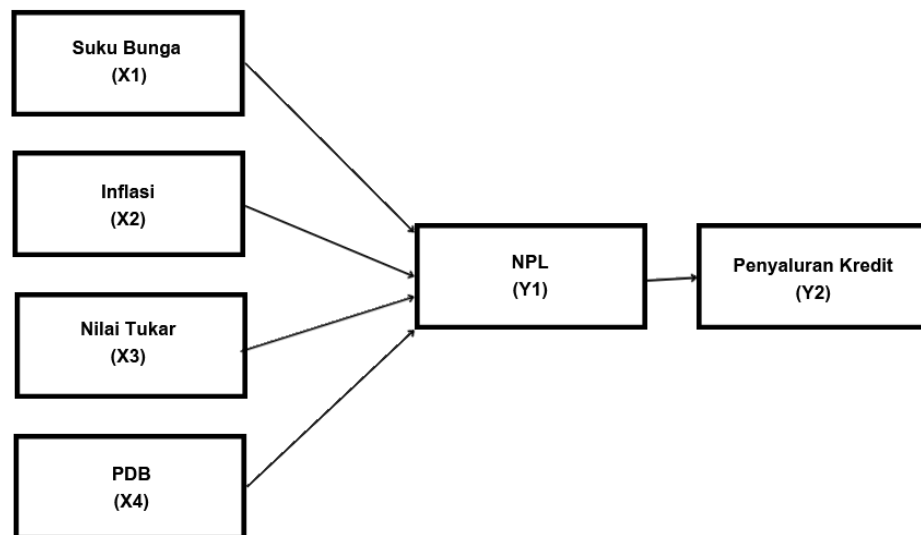
kredit. Penelitian - penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi makro merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas kredit perbankan.

Selain penelitian terkait faktor makroekonomi yang memengaruhi NPL, beberapa studi juga meneliti bagaimana NPL berdampak pada penyaluran kredit. Penelitian Pratama dan Yuliani (2025) menemukan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank-bank yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Ketika NPL meningkat, bank cenderung memperketat standar penyaluran kredit sehingga aktivitas penyaluran kredit menjadi semakin terbatas. Pola ini memperlihatkan bahwa NPL merupakan variabel penting yang menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit.

Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih memfokuskan analisis pada hubungan langsung antara variabel makroekonomi dan penyaluran kredit atau pada hubungan langsung antara variabel makroekonomi dan NPL. Masih jarang penelitian yang menempatkan NPL sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara faktor makroekonomi dan penyaluran kredit. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar penting untuk dikaji lebih lanjut. Dengan adanya kekosongan penelitian tersebut, studi ini berusaha melengkapi literatur dengan menguji peran NPL sebagai mediator, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perubahan kondisi makroekonomi memengaruhi proses penyaluran kredit melalui peran risiko kredit dalam sistem perbankan Indonesia



2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman teoritis bahwa kondisi makroekonomi memiliki pengaruh penting terhadap stabilitas perbankan. Variabel seperti suku bunga (X1), inflasi (X2), nilai tukar (X3), dan PDB (X4) merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kualitas aset bank, yang dalam penelitian ini direpresentasikan melalui *Non-Performing Loan (NPL)* (Y1). Perubahan tingkat NPL kemudian berimplikasi pada kemampuan bank dalam menyalurkan kredit (Y2). Dengan demikian, hubungan antara variabel makroekonomi, NPL, dan penyaluran kredit dapat dipahami sebagai rangkaian pengaruh yang saling terhubung dalam menentukan kinerja perbankan.

Suku bunga yang tinggi menyebabkan beban bunga yang lebih besar bagi debitur, sehingga risiko gagal bayar naik dan NPL meningkat. Inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat dan kinerja usaha, sehingga kualitas aset bank memburuk dan menaikkan NPL. Dari sisi nilai tukar, ketika rupiah



melemah, biaya impor menjadi lebih mahal bagi pelaku usaha yang bergantung pada barang modal atau bahan baku impor. Kondisi ini dapat menekan profitabilitas perusahaan dan melemahkan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya, sehingga risiko peningkatan NPL semakin besar.

Sementara itu, pertumbuhan PDB yang tinggi menandakan ekonomi yang sehat, sehingga kemampuan debitur untuk membayar kredit juga meningkat, sehingga resiko NPL menurun. Semakin rendah NPL, maka bank menjadi lebih percaya diri untuk memberikan kredit karena risiko pembiayaan berada dalam kondisi yang terkendali. Sebaliknya, jika NPL berada pada tingkat yang tinggi, bank akan bersikap lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit guna menjaga stabilitas dan kesehatan keuangannya.

Dalam konteks tersebut, NPL digunakan sebagai variabel mediasi karena NPL berfungsi sebagai mekanisme penghubung yang menjelaskan bagaimana perubahan kondisi makroekonomi diterjemahkan ke dalam keputusan penyaluran kredit oleh perbankan. Variabel makroekonomi tidak secara langsung memengaruhi jumlah kredit yang disalurkan, melainkan terlebih dahulu memengaruhi kualitas kredit yang tercermin dari tingkat NPL. Selanjutnya, perubahan NPL inilah yang menjadi dasar pertimbangan bank dalam menentukan apakah penyaluran kredit akan ditingkatkan atau justru dibatasi. Dengan kata lain, NPL menjadi saluran transmisi yang menjembatani pengaruh variabel makroekonomi terhadap penyaluran kredit perbankan.



alam perkembangannya, hubungan antara variabel-variabel ekonomi dan kondisi perbankan juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan arah kebijakan yang diterapkan pemerintah. Setelah krisis keuangan

global 2008, Indonesia menghadapi tekanan pada suku bunga, inflasi, dan nilai tukar, sehingga kebijakan stabilisasi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas kredit perbankan. Situasi tersebut kembali terjadi pada pandemi COVID-19 tahun 2020, ketika aktivitas ekonomi menurun tajam dan pemerintah menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk menahan lonjakan NPL.

Pada periode pascapandemi, Bank Indonesia mulai memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan makroprudensial hijau, yaitu kebijakan yang mendorong bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dinilai lebih tahan terhadap risiko, seperti energi terbarukan dan industri berkelanjutan. Dengan insentif dan kelonggaran tertentu, kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas kredit, mengurangi risiko NPL, dan memperkuat ketahanan perbankan terhadap gejolak ekonomi.

Dengan demikian, dalam kerangka penelitian ini, NPL tidak hanya diposisikan sebagai indikator kesehatan perbankan, tetapi juga sebagai variabel mediasi yang secara aktif menjelaskan mekanisme pengaruh kondisi makroekonomi terhadap penyaluran kredit. Melalui peran mediasi tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses penyaluran kredit perbankan dalam menghadapi dinamika ekonomi makro dan kebijakan yang berkembang.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian yaitu :



suku bunga berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan (NPL)*, dan NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit sehingga

secara tidak langsung suku bunga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit melalui NPL.

2. Inflasi dari sisi produsen berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan (NPL)*, dan NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit sehingga secara tidak langsung inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit melalui NPL.
3. Nilai tukar berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan (NPL)*, dan NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit sehingga secara tidak langsung nilai tukar berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit melalui NPL.
4. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loan (NPL)*, dan NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit sehingga secara tidak langsung PDB berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit melalui NPL.
5. *Non-Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit di Indonesia.

